

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Fadhli (2025) dalam judul “Pengaruh Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekurangan dalam cara pengelolaan dijalankan, terutama dalam hal membaca kebutuhan ekonomi warga dan menciptakan gagasan-gagasan yang inovatif serta responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat desa. Keberhasilan suatu lembaga di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga tersebut mengorganisasi relasi sosial, mendayagunakan potensi masyarakat, dan membangun kepercayaan melalui perencanaan yang partisipatif. Ketika pengelolaan tidak mampu membaca kebutuhan sosial masyarakat dan tidak mampu memberikan arah yang jelas terhadap tujuan bersama, maka potensi kolaborasi akan melemah, begitu pula dengan partisipasi. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah nasabah BUM Desa dan pengelola di desa ganting yang telah ditentukan jumlah sampel penelitian menggunakan total sampling. Sehingga didapatkan sampel keseluruhan sebanyak 96 orang. Dan Objek penelitian adalah pengaruh pengelolaan BUM Desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Ganting. Sementara itu teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah melalui penyebaran angket dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui hipotesis penelitian adalah menggunakan uji regresi linear sederhana yang mana berdasarkan hasil pengujiannya menunjukkan nilai t hitung sebesar 8.422 lebih besar dari pada t tabelnya sehingga didapatkan hasil hipotesis pada penelitian ini H_0 diterima H_a ditolak. Dari hasil uji korelasi pearson menunjukkan nilai sebesar 65,6% yang diartikan dengan pengelola BUM Desa memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan ekonomi Masyarakat di Desa Ganting. Sedangkan pada pengujian koefisien determinasi menunjukkan hasil bahwasanya pengelola BUM Desa mempengaruhi peningkatan ekonomi Masyarakat di Desa Ganting sebesar 43% dan sisanya 57% dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian ini

2. Rina Fitriani (2022) dalam judul “Pengaruh Modal, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Terhadap Kinerja BUMDES di Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal, sumber daya manusia (SDM), dan manajemen terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode survei kepada 100 pengelola BUMDes dari 10 kecamatan. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan software SPSS versi 25. Hasil uji validitas (r -hitung $>$ r -tabel) dan reliabilitas (Cronbach Alpha $>$ 0,7) menunjukkan instrumen layak. Temuan: (1) Modal berpengaruh positif

dan signifikan ($\beta=0,452$; $t=4,23$; $p=0,000$); (2) SDM berpengaruh positif ($\beta=0,321$; $t=3,15$; $p=0,002$); (3) Manajemen berpengaruh positif ($\beta=0,289$; $t=2,89$; $p=0,005$); (4) Secara simultan ketiganya berpengaruh 72,5% ($R^2=0,725$). Kesimpulan: Peningkatan modal menjadi prioritas utama untuk optimalisasi kinerja BUMDes. Saran: Pemerintah daerah perlu fasilitasi akses kredit murah bagi BUMDes."

B. Teoritis

1. Pengelolaan BUMDes

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata *management*, yang berarti mengatur, mengelola, menangani, serta membuat sesuatu sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Ibrahim (2018: Manajemen Badan Usaha Milik Desa) mendefinisikan pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan usaha untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Terry dalam Mustofa Abi Hamid, dkk (2021:2) mendefinisikan pengelolaan sebagai proses atau cara yang tersistematis untuk melakukan sesuatu. Proses tersebut terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling).

Appley dalam Mustofa Abi Hamid, dkk (2021:3) pengelolaan merupakan seni atau ilmu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dilakukan dengan usaha orang lain.

Fattah (2019) dalam Mustofa Abi Hamid, dkk (2021:3) mendefinisikan pengelolaan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Pengelolaan merupakan proses sistematis yang dirancang untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui tahapan terstruktur yang mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan operasional, dan pengawasan berkelanjutan guna mencapai efektivitas dan efisiensi maksimal. Pengelolaan tidak terbatas pada eksekusi tugas, melainkan melingkupi seluruh siklus manajerial yang saling terkait.

George R. Terry (2016: Manajemen Prinsip dan Praktik, Bandung: Bumi Aksara) mendefinisikan pengelolaan atau manajemen sebagai proses terintegrasi yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Keempat fungsi tersebut bersifat interdependen dan menjadi fondasi operasional organisasi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Hasibuan (2016: Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara) menggambarkan pengelolaan

sebagai ilmu sekaligus seni dalam mengkoordinasikan sumber daya manusia dan non-manusia secara optimal untuk meraih sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan menjadi elemen determinan utama dalam menentukan kesuksesan organisasi.

b. Pengelolaan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas bisnis desa yang dibentuk berdasarkan identifikasi potensi dan kebutuhan lokal guna memperkuat basis ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan kolektif. BUMDes berorientasi pada pengelolaan usaha yang produktif dan berkelanjutan.

Pembentukan BUMDes diatur lebih rinci melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi dasar hukum bagi desa dalam mengelola BUMDes. Perda ini memberikan pedoman mengenai prosedur pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan BUMDes agar sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDes wajib dilakukan secara profesional, transparan, dan berpusat pada kepentingan publik karena selain berperan sebagai instrumen ekonomi, BUMDes juga berfungsi sebagai wadah pemberdayaan komunitas desa. Oleh karenanya, pengelolaan BUMDes harus mampu memaksimalkan potensi lokal sambil memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam prosesnya.

Definisi Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Modal atau sumber dana BUMDes bisa berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

c. Konsep Tata Kelola (Governance)

Dalam ranah organisasi publik, pengelolaan tidak terpisahkan dari paradigma tata kelola (governance), yaitu sistem pengaturan dan pengendalian organisasi untuk menjamin keselarasan dengan misi yang telah dirumuskan.

Sedarmayanti (2017) menambahkan bahwa tata kelola yang baik adalah proses penyelenggaraan organisasi yang berlandaskan keterbukaan informasi, tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan, serta partisipasi masyarakat yang substansial.

Akibatnya, tata kelola menjadi pilar fundamental dalam pengelolaan entitas publik seperti BUMDes untuk menjamin operasional yang efektif, efisien, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

d. Dimensi Pengelolaan BUMDes

Pada penelitian ini, pengelolaan BUMDes dioperasionalkan berdasarkan dimensi tata kelola menurut Ibrahim (2018), meliputi:

- 1) Kooperatif
Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif
Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif
Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama, karena masyarakat memiliki hak yang sama.
- 4) Transparan
Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) Akuntabel
Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif kepada lembaga berwenang dan masyarakat.
- 6) Sustainabel
Kegiatan usaha harus dapat ikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes secara berkelanjutan.

2. Kepuasan Masyarakat

a. Pengertian Kepuasan

Kepuasan merupakan respons evaluatif individu terhadap disparitas antara performa aktual suatu produk atau layanan dengan ekspektasi pra-pengalaman. Kepuasan berfungsi sebagai indikator kunci kualitas organisasi pelayanan.

Philip Kotler, Keller & Chernev (2022: *Marketing Management*, 16th Edition, New Jersey: Pearson Education) mendefinisikan kepuasan sebagai kondisi afektif senang atau kecewa yang timbul

akibat perbandingan antara performa yang dialami dengan standar harapan. Kepuasan manifest ketika performa setara atau melebihi antisipasi, sedangkan ketidakpuasan muncul ketika performa di bawah ekspektasi.

Fandy Tjiptono (2019: Strategi Pemasaran) melengkapi bahwa kepuasan pelanggan adalah penilaian kognitif terhadap pengalaman konsumsi produk atau jasa yang merefleksikan derajat pemenuhan ekspektasi. Dengan demikian, kepuasan merupakan outcome dari proses disparitas harapan-kinerja.

b. Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat merujuk pada tingkat afeksi positif yang dirasakan komunitas pasca-menerima manfaat atau layanan dari institusi publik. Dalam domain pelayanan publik, kepuasan masyarakat menjadi benchmark utama efektivitas organisasi.

Tjiptono (2019) menegaskan bahwa kepuasan masyarakat atau pelanggan publik dapat dijadikan parameter objektif untuk mengukur kualitas layanan organisasi. Semakin elevasi kepuasan, semakin unggul persepsi kualitas pelayanan.

Dalam perspektif BUMDes, kepuasan masyarakat merepresentasikan sejauh mana pengelolaan usaha desa selaras dengan aspirasi dan kebutuhan warga desa.

c. Ukuran Kepuasan Masyarakat

Penelitian ini mengadopsi dimensi kepuasan menurut Kotler, Keller & Chernev (2022), yaitu:

- 1) Kepuasan terhadap Produk
Dimensi ini menilai kualitas intrinsik produk BUMDes, seperti atribut telur ayam petelur, struktur harga, dan nilai manfaat yang dipersepsikan masyarakat.
- 2) Kepuasan terhadap Pelayanan
Dimensi pelayanan mengukur kualitas interaksi, meliputi sikap pengelola, efisiensi proses, dan aksesibilitas layanan.

- 3) Kepuasan Secara Keseluruhan
Kepuasan agregat merefleksikan penilaian holistik terhadap BUMDes, terindikasi melalui loyalitas berkelanjutan dan intensi rekomendasi.

3. Hubungan Pengelolaan BUMDes dengan Kepuasan Masyarakat

Pengelolaan BUMDes yang optimal secara kausal menghasilkan efek afirmatif terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Implementasi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi yang substantif akan mempererat kepercayaan publik terhadap BUMDes.

Sebaliknya, pengelolaan yang suboptimal menginduksi degradasi kualitas layanan dan manfaat, sehingga menekan persepsi kepuasan masyarakat.

Oleh karena itu, terdapat korelasi fungsional antara pengelolaan BUMDes dan kepuasan masyarakat, di mana eskalasi kualitas pengelolaan berkorelasi langsung dengan peningkatan kepuasan komunitas.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan variabel Pengelolaan BUMDes (Variabel X) dengan Kepuasan Masyarakat (Variabel Y) dengan indikator sebagai berikut:

1. Pengelolaan BUMDes (Variabel X)

Pengelolaan BUMDes menurut Ibrahim (2018) mencakup enam dimensi utama, yaitu:

- a. Kooperatif
- b. Partisipatif

- c. Emansipatif
- d. Transparan
- e. Akuntabel
- f. Sustainabel

2. Kepuasan Masyarakat (Variabel Y)

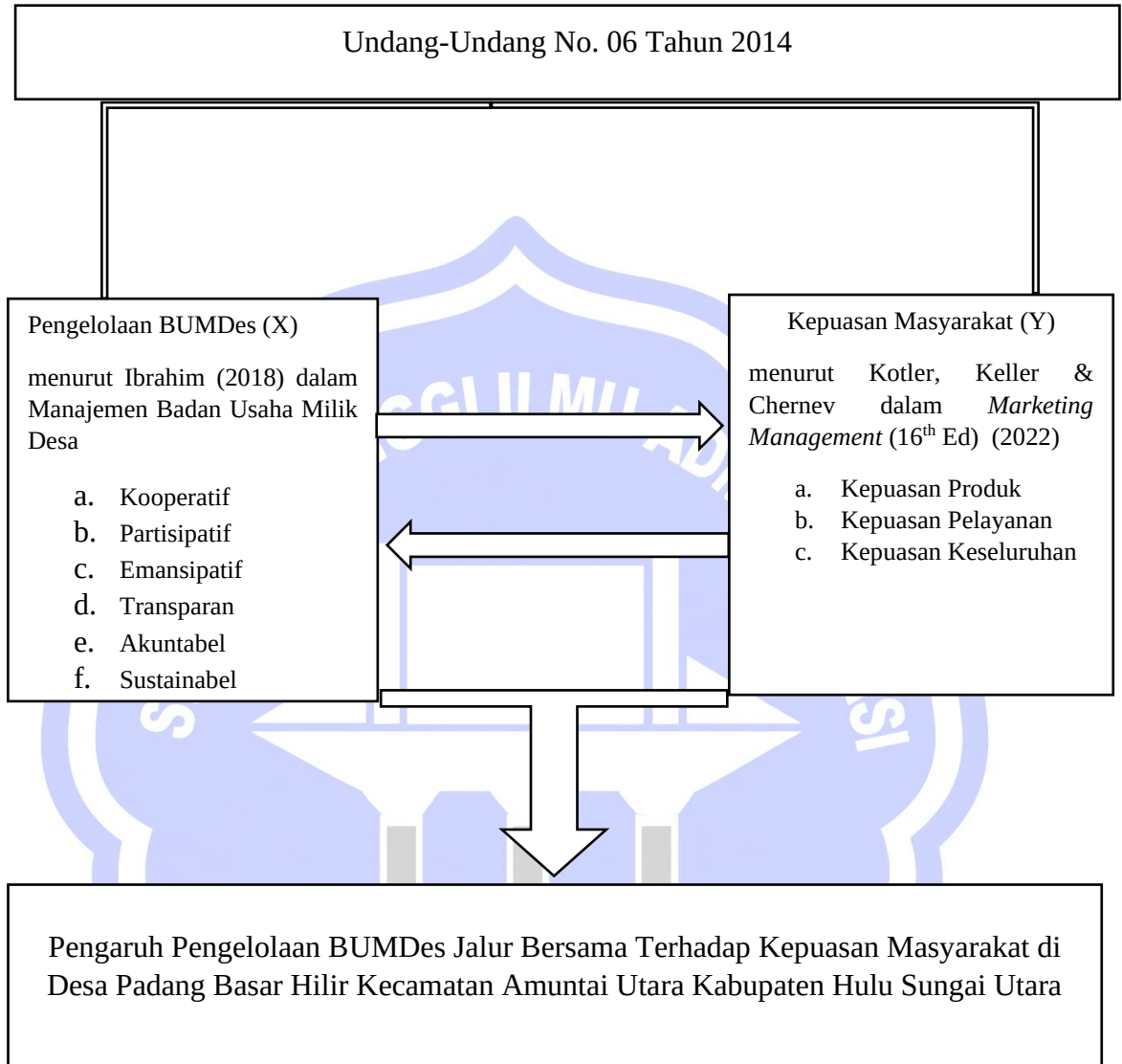
Kepuasan masyarakat menurut Kotler, Keller and Chernev dalam Marketing Management (16th Ed) (2022) terdiri dari tiga area fokus penilaian, yaitu:

- a. Kepuasan produk
- b. Kepuasan pelayanan
- c. Kepuasan keseluruhan

Dari 2 (Dua) variabel tersebut maka akan diketahui pengaruh Pengelolaan BUMDes Jalur Bersama Terhadap Kepuasan Masyarakat di Desa Padang Basar Hilir Kecamatan Amutai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan gambaran karangka pemikiran sebagai berikut.

STIA AMUNTAI

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah peneliti, 2026

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dan asumsi-asumsi tersebut di atas, maka dapat ditarik hipotesis yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu:

Ha Terdapat pengaruh yang signifikan antara pangelolaan BUMDes Jalur Bersama terhadap kepuasan masyarakat di Desa Padang Basar Hilir Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ho Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan BUMDes Jalur Bersama terhadap kepuasan masyarakat di Desa Padang Basar Hilir Kecamatan Amuntai Utara Hulu Sungai Utara.

